175 Prajurit Diberangkatkan ke Kongo untuk Misi Perdamaian

JAKARTA (IM) - Sebanyak 175 prajurit TNI diberangkatkan ke Kongo. Tugas misi perdamaian yang diemban mereka bukanlah tugas yang mudah.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mengatakan, prajurit Indonesia di misi PBB tak hanya dikenal karena profesionalisme dalam melaksanakan tugas, tetapi juga memiliki kemampuan tinggi untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat di tempat tugas.

"Oleh sebab itu, dengan prinsip 'to win heart and mind' misi akan berjalan dengan baik dan lancar karena dapat diterima masyarakat di daerah operasi," katanya dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Staf Umum (Kasum) Letjen TNI Ganip Warsito saat upacara pemberangkatan Satgas MONUSCO Tahun 2021 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/2).

Hadi berkeyakinan dengan bekal latihan, keterampilan dan pengetahuan yang telah dimiliki, prajurit satgas akan dapat mengemban tugas tersebut dengan baik.

"Lengkapi lesson learned dari Satgas sebelumnya dengan kemampuan taktis di lapangan yang adaptif dan inovatif untuk mencapai keberhasilan tugas. Selain itu unsur komandan harus benar-benar memahami kemampuan dan batas kemampuan, rincian tugas, prosedur standar operasi ataupun aturan pelibatan yang telah ditentukan," ujarnya.

Satgas TNI Konga MONUSCO Tahun 2021 terdiri dari 175 prajurit gabungan dari tiga matra, yakni TNI AD, TNI AL dan TNI AU. ● **mei**

Oknum TNI Jual Ratusan Amunisi Diduga untuk KKB, Begini Modusnya

AMBON (IM) - Seorang oknum prajurit TNI dari kesatuan Yonif 731 Masariku, Kodam XVI Pattimura terlibat dalam bisnis penjualan senjata dan amunisi kepada warga sipil yang diduga berhubungan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Oknum prajurit TNI tersebut berinisial Praka MS, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel tahanan Denpom XVI Pattimura.

Komandan Detasemen Polisi Militer (Kapomdam) Kodam XVI Pattimura Kolonel Cpm Paul Jhohanes Pelupessy mengatakan, Praka MS ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam penjualan 600 butir amunisi kepada warga sipil.

"Soal kepemilikan 600 amunisi jadi untuk kepemilikannya ini dimiliki oleh Praka MS untuk kesatuan dari Yonif 733 Masariku, untuk yang bersangkutan saat ini sudah ditahan, karena tadi malam baru kami terima," kata Paul, kepada waratwan di kantor Polresta Pulau Ambon, Selasa (23/2).

Praka MS sendiri diketahui menjual ratusan amunisi itu ke warga sipil bernama AT. Selanjutnya, AT kemudian menjual kembali amunisi itu kepada J. Kedua warga sipil tersebut telah ditahan di Polresta Pulau Ambon dan ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilkukan, J megaku ke penyidik bahwa senjata dan amunisi yang dibelinya baik dari anggota Polri maupun TNI itu akan dijual ke pihak KKB di Papua.

Ia membeberkan dari hasil pemeriksaan sementara, prajurit TNI tersebut mengaku mendapatkan ratusan amunisi yang dijualnya itu dari latihan menembak. Menurut Paul, setiap kali mengikuti latihan menembak, tersangka kerap menyembunyikan amunisi yang diberikan kepadanya dan diambil kembali keesokan harinya setelah latihan menembak selesai.

"Setelah kami lakukan penyelidikan sampai saat ini yang bersangkutan mengaku mengumpulkan amunisi itu seorang diri tanpa melibatkan rekan-rekannya yang lain," ujarnya. ● **han**

KPK Periksa Pejabat di Yogyakarta Terkait Korupsi Pembangunan Stadion

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida tahun anggaran 2016-2017. Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Sleman, Jawa Tengah (Jateng).

Kelimanya yakni, Aminto Mangun Diprojo (Sekretaris Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta), Suroyo (Kepala Bidang Perencanaan Dikpora DIY), Sumadi (Inspektorat DIY), Aminto Mangun Diprojo (Pemilik PT Kenanga Mulya, PT Bimapatria, dan PT Tata Analisa Multi Mulya), serta Thomas Hartono dari pihak swasta.

" Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Sleman Jl Magelang KM.12,5, Krapyak, Tirharjo, Kabupaten Sleman," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (23/2).

Sekadar informasi, KPK memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, di Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun anggaran 2016-2017. Kasus itu sudah masuk dalam proses penyidikan.

Sejalan dengan adanya proses penyidikan, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida ini. Sayangnya, KPK masih enggan mengungkap siapa tersangka dalam kasus ini.

"Kami belum bisa berikan informasi lebih spesifik karena masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini," ucap Ali, beberapa waktu lalu.

Sesuai kebijakan baru pimpinan KPK jilid V, lembaga antirasuah akan mengumumkan penetapan tersangka setelah dilakukan proses penangkapan dan penahanan. Ali pun berjanji pihaknya akan transparan dalam mengusut perkara tersebut.

Pengumuman penetapan akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka. Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Ali. ● **han**

IDN/ANTARA

TARGET RENOVASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Siti Aisyah (73 tahun) duduk di depan rumahnya yang terbuat dari bilik bambu di RT 03/03 Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/2). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk merenovasi sekitar 114 ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2021.

IDN/ANTARA

TNI AL SALURKAN BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) meninjau truk yang mengangkut bantuan sosial untuk korban banjir di Pangkalan Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/2). TNI AL melalui program kegiatan TNI AL Peduli dan Berbagi menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan lain-lainnya untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah banjir di Bekasi, Karawang dan sekitarnya.

UU ITE Kerap Timbulkan Kegaduhan karena Dijadikan Alat untuk Saling Lapor

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, selama ini Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) justru kerap menimbulkan kegaduhan di media sosial. UU ITE justru dijadikan alat untuk saling lapor.

JAKARTA (IM) - Pihak Komnas HAM melakukan pertemauan dengan pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk membahas tentang penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Selasa (23/2).

Teman sentral yang dibahas menyangkut tata kelola penanganan kasus terkait UU ITE dalam kerangka hak asasi manusia. Sebab, Komisioner Komnas HAM RI Hairansyah Ahmad mengatakan, penerapan UU ITE saat ini menjadi polemik dalam penegakan hukum.

"Oleh karenanya penting bagi Komnas HAM RI dan Polri untuk berkolaborasi membangun mekanisme bersama guna penanganan kasus ujaran kebencian, hoaks, dan kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekpresi lainnya yang berlandaskan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya mediasi HAM," ucap Hairansyah dalam keterangannya, Selasa (23/2).

Dalam pertemuan tersebut, Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip HAM demi publik. Tak terkecuali, di dalam ranah dunia digital atau sosial media.

"Penting menjaga prinsip HAM guna kepentingan publik dalam memanfaatkan ruang sosial media, termasuk di dalamnya skenario penegakan hukum, termasuk bagaimana menggunakan rabat plan of action," ujar Anam dalam keterangan yang sama.

Setelah pertemuan, Komnas HAM dan Dittipidsiber Bareskrim menghasilkan kesepakatan awal bahwa bakal melanjutkan dengan pertemuan konkret. Adapun kedua belah pihak bakal membahas lebih lanjut soal mekanisme penanganan dan kontribusi masing-masing dalam kasus-kasus berbasis ITE.

"Kerangka kerja bersama kedua lembaga akan dibahas lebih lanjut dalam tim bersama yang akan mendalami prinsip HAM, mekanisme penegakan hukum, termasuk koordinasi antarlembaga," kata Anam.

Timbulkan Kegaduhan

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengatakan, Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menimbulkan kegaduhan di media sosial.

"UU ITE ini menjadi alat untuk saling lapor ke kepolisian. Ini menyebabkan banyak orang yang sebenarnya korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," kata Azis dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (23/2).

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung itu menilai, polemik terhadap UU ITE terlihat dari Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 3 serta Pasal 28 Ayat 2. Menurutnya, berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak warga Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28E, dan Pasal 28J.

"Pasal- pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial," paparnya.

Selain itu, individu juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebab itu, menurut Azisd, perlu ada pemahaman secara yuridis dan normatif terkait penyebaran informasi selain teori hukum. "Ada pula konvergensi dari empat bidang ilmu, yakni teknologi telekomunikasi, informasi, dan komunikasi," ujarnya menambahkan.

Empat bidang ilmu itu, kata Azis, meliputi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 16 Tahun 2016 (UU ITE), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Lebih lanjut, Azis menuturkan, jika terus menimbulkan polemik hukum dan menyebabkan praktik penerapan hukum cacat, UU ITE layak dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Karena belum ada literasi digital baik dan banyaknya kasus multitafsir berdasarkan hukum karet, ada baiknya UU ITE dimasukkan dalam Prolegnas 2021," ujarnya. ● **mei**

IDN/ANTARA

KEMENDAGRI PERPANJANG PPKM BERSKALA MIKRO

Petugas Linmas Kelurahan Cimahi membawa replika keranda mayat saat sosialisasi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro di Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat, Selasa (23/2). Kementerian Dalam Negeri kembali memperpanjang PPKM berskala mikro yang berlaku mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021 guna mencegah penyebaran Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan.

Nasdem Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Vaksin Covid-19

JAKARTA (IM) - Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai Nasdem, Okky Asokawati mengatakan,temuan riset mengenai keengganan publik untuk divaksin harus dicermati oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dikatakan Okky merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menemukan 41 persen masyarakat tak bersedia divaksin.

"Temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembenahan tata kelola vaksin Covid-19 secara menyeluruh. Kunci utamanya tumbuhkan kepercayaan di publik mengenai vaksin Covid-19," ujarnya di Jakarta, Selasa (23/2).

Pembenahan tata kelola vaksin Covid-19, menurut Okky, harus dilakukan secara menyeluruh di semua aspek.

"Mulai tata kelola komunikasi dan narasi dan tata kelola kebijakan tentang vaksin Covid-19," tambah Okky.

Terkait tata kelola komunikasi, Anggota Komisi IX DPR ini menyoroti komunikasi publik pemerintah dinilai tidak fokus dan mengesankan tidak terkonsolidasi dengan baik dalam menyampaikan mengenai vaksin Covid-19. Sehingga, hal ini berdampak terhadap target vaksin yang dicanangkan pemerintah.

"Sejak rencana adanya vaksin, komunikasi publik pemerintah tampak tidak konsisten. Seperti rencana vaksin di bulan November, Desember dan baru terealisasi di pertengahan Januari. Ini jadi preseden tidak baik bagi publik. Ujungnya soal kepercayaan publik," ujarnya.

Lebih lanjut mantan Model kenamaan ini mengatakan, tata kelola kebijakan vaksin juga sering memantik perdebatan di publik. Okky menyebut wacana vaksin mandiri oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi publik. "Ide vaksin mandiri ini telah memancing reaksi tidak baik di publik. Ada asas keadilan yang menjadi concern publik atas rencana ini. Di poin ini, tata kelola kebijakan harus dikonsolidasikan dengan baik," katanya.

Selain itu, sambung dia, wacana vaksin merah putih atau vaksin Nusantara juga menunjukkan kebijakan pemerintah belum tersampaikan dengan baik di publik. "Penemuan baru terkait dengan vaksin Covid-19 ini tentu kita apresiasi. Tetapi baiknya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan senantiasa menyampaikan perkembangan riset, kemajuan termasuk bagaimana dengan pembiayaan vaksin tersebut," tegas Okky.

Menurutnya, hal itu masih ditambah dengan keraguan kehalalan vaksin oleh sebagian masyarakat.

Fenomena ini disebutnya tidak terlepas adanya kesan kemendadakan yang dilakukan oleh MUI termasuk BPOM dalam hal sertifikasi halal dan ijin edar vaksin Covid-19.

"Saat ini tugas bersama semua pihak untuk edukasi dan sosialisasi ke publik mengenai keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 ini," tandasnya. ● **han**

Respon Mahfud MD saat Dengarkan Curhat Tokoh Papua soal Dana Otsus

JAKARTA (IM) - Tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku curhat di depan Menko Polhukam, Mahfud MD. Ia meminta agar penegakan hukum dilakukan di Papua secara terorganisir. Termasuk, bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Hal ini disampaikannya ketika Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua melakukan audiensi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, di Jakarta, Senin (22/2).

"Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana Otsus," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (23/2).

Albert menuturkan, Otsus adalah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Menurutnya, bila digunakan dengan baik akan menjadi berkah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Senada dengan itu, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue, meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus sejak 2002 sampai saat ini. Menurutnya, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevalusi kesenjangan antar wilayah adat yang masih terjadi.

"Provinsi Papua mesti dimekarkan, untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat," katanya.

Menanggapi itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku akan menindaklanjutinya. Menurut Mahfud, dis telah mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri agar penegakan hukum segera melakukan penegakan hukum di Papua.

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," ujar Mahfud.

Terkait berbagai usulan lain termasuk pemekaran provinsi, Menko Polhukam menegaskan akan meneruskan dengan dua langkah. Pertama, proses legislasi yang nanti akan disampaikan kepada tim melalui Kemendagri. "Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala derah dan tokoh masyarakat tadi," ucapnya. ● **han**

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

Sehubungan akan dilakukan pengambilalihan sebagian besar saham milik salah satu pemegang saham **PT SIANYU PERKASA MANDIRI**, berkedudukan di Jakarta Pusat **("Perseroan")** beralamat kantor di Komplek Ruko Roxy Mas Blok D-1 No.44, Jalan KH Hasyim Ashari No.125, Jakarta Pusat, yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham pengendali dalam Perseroan, maka dengan ini diumumkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Kreditur, dapat menghubungi dan/atau mengajukan keberatan secara tertulis kepada perseroan pada alamat tersebut diatas, disertai bukti-bukti yang mendukung untuk diadakan penyelesaian, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini diumumkan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DIREKSI PT SIANYU PERKASA MANDIRI

RALAT

Sehubungan dengan iklan Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ABS Industri Indonesia ("Perseroan"), yang dimuat di Harian International Media tanggal 22 Februari 2021, dengan ini Direksi Perseroan merubah agenda RUPSLB, yaitu :

Sebelumnya :

Agenda RUPSLB :

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Menjadi :

Agenda RUPSLB :

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian KBLI 2017.

Bahan acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

24 Februari 2021
Direksi
PT. ABS INDUSTRI INDONESIA